



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2023

OLEH :
Dr. ENI ROHYANI S.H., M.HUM., CGCAE
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Garut, 18 April 2024



SISTEMATIKA

2. Realisasi Anggaran Tahun 2023
(Program & Kegiatan)

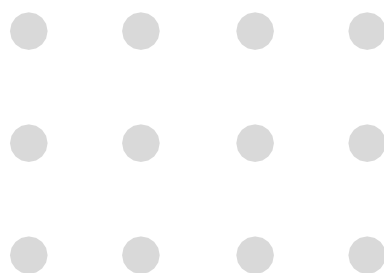
4. Kebijakan Strategis Tahun 2023

6. Pengharagaan Tahun 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
Gubernur dan atau Perangkat
Daerah Tahun 2023 (target dan
capaian)

3. Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap LKPJ TA 2022

5. Program Strategis Tahun 2023





CAPAIAN IKU INSPEKTORAT DAERAH

2023

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat

TARGET 2023 : **4.354**
CAPAIAN 2023 : **Rilis April 2024***

CAPAIAN 2022:
3.648 Poin

CAPAIAN 2021 :
Peringkat 5 (Skor 3,52)

Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

TARGET 2023 : **A**
CAPAIAN 2023 : **A**

CAPAIAN 2022 :
A

CAPAIAN 2021:
A

Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah

TARGET 2023 : **WTP**
CAPAIAN 2023 : **WTP**

CAPAIAN 2022 :
WTP

CAPAIAN 2021:
WTP

Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

TARGET 2023 : **Level 3**
CAPAIAN 2023 : **Level 3 (3.375)**

CAPAIAN 2022 :
Level 3

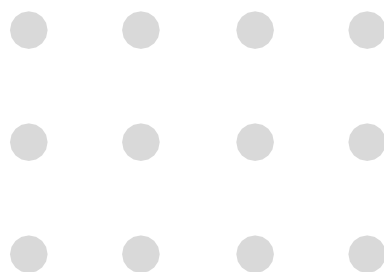
CAPAIAN 2021:
Level 3

Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi (RAD-PPK) – Nilai MCP

TARGET 2023 : **98.80%**
CAPAIAN 2023 : **97,62%**

CAPAIAN 2022:
98,23%

CAPAIAN 2021 :
94,54%





REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (PROGRAM & KEGIATAN)

3 PROGRAM | 11 KEGIATAN | 33 SUB KEGIATAN

Berdasarkan APBD Perubahan TA 2023 anggaran Inspektorat mencapai **0.30%** dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, anggaran pengawasan dialokasikan sebesar 0,30% dari total belanja daerah.

KEGIATAN PENGAWASAN

KEGIATAN PRIORITAS

1. Reviu RPJMD;
2. Reviu RKPD;
3. Reviu RKA dan KUA PPAS
4. Reviu LKPD;
5. Reviu LKIP;
6. Reviu EPPD;
7. Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Provinsi;
8. Reviu Penyerapan APBD dan Barjas;
8. Evaluasi SAKIP Provinsi;
9. Maturitas SPIP;
10. Evaluasi SAKIP Kab/Kota;
11. Pemeriksaan Reguler;
12. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
13. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
14. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
15. Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
16. TLHP BPK; APIP, BPKP dan ITJEN

KEGIATAN PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

1. Pengawasan Dana Desa
2. Evaluasi Penganggaran Responsif Gender;
3. P3DN;
4. Inflasi Daerah;
5. Pengawasan Dana BOS;
6. Pengawasan Kemiskinan Ekstrime

KEGIATAN PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Evaluasi Pelayanan Publik;
3. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap PD dan Pemerintah Kab/Kota;
4. Kerjasama Dengan APH;
5. Satgas Saber Pungli;
6. Kelompok Pegiat Antikorupsi.

PAGU INSPEKTORAT DAERAH

Rp121.491.120.200,-

Belanja Pegawai **Rp57.538.026.956,-**

Belanja Barang dan Jasa **Rp45,972,610,464,-**

Belanja Hibah **Rp5.000.000.000,-**

KEGIATAN PENEGAKAN INTEGRITAS

1. Penanganan Pelaporan Gratifikasi;
2. Monev Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK);
3. Fasilitasi LHKASN.;
4. *Whistle Blower System* & Benturan Kepentingan;
5. Pembangunan Zona Integritas .

KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP / INSPEKTORAT

Upaya-upaya Perbaikan Kemampuan Inspektorat dalam Melaksanakan peran sebagai *Consulting & Assurance* (Inspektorat Provinsi Jawa Barat Sejak Tahun 2016 Sudah Mencapai Level 3 Untuk Kapabilitas APIP).

PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah
2. Efisiensi
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran



REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (PROGRAM & KEGIATAN)

PAGU INSPEKTORAT DAERAH

Rp121.491.120.200,-

REALISASI INSPEKTORAT DAERAH

Rp97,303,707,830,-

80,09%

Belanja Pegawai

Rp57.538.026.956,-

70,71%

Rp40,684,624,067,-

Belanja Hibah

Rp5.000.000.000,-

99,99%

Rp4,999,329,000,-

Belanja
Barang dan Jasa

Rp 45,972,610,464,-

84,97%

Rp 39,064,112,807,-

Belanja Modal

Rp12,980,482,780,-

96,73%

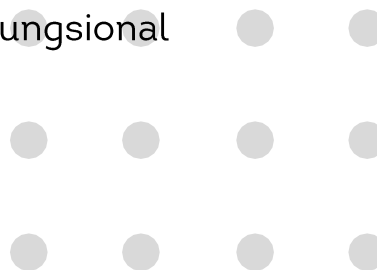
Rp12,555,641,956,-

1. Pagu Anggaran Murni sebesar Rp101.974.070.446,00, pada akhir bulan Oktober capaian realisasi sebesar 63,54 persen. Selanjutnya pada perubahan anggaran (bulan November), terdapat tambahan anggaran sebesar Rp19.517.049.754,00 hal tersebut sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat bahwa Anggaran Pengawasan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah paling sedikit sebesar 0,30% dari total Belanja Daerah. Maka total pagu anggaran Inspektorat Daerah menjadi Rp121.491.120.200,00. Mengingat penambahan pagu tersebut dilakukan pada proses perubahan anggaran, maka waktu yang tersedia (November - Desember) untuk melakukan penyerapan belanja tidak bisa dilakukan secara optimal.
2. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.853.402.889,00, hal ini disebabkan oleh penyediaan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pembayaran kenaikan tunjangan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp11.904.402.889,00 belum dapat dilakukan karena pada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tidak mencakup usulan tambahan kenaikan tunjangan kondisi kerja pada pegawai Inspektorat Daerah sehingga tidak dapat diusulkan realisasinya. Selanjutnya, pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dimaksud telah dipersiapkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi calon pegawai Jabatan Fungsional (Auditor dan PPUPD) kurang lebih sebesar Rp4.949.000.000,00, namun sampai dengan akhir tahun anggaran tambahan pegawai dimaksud belum dapat terealisasi.

Target

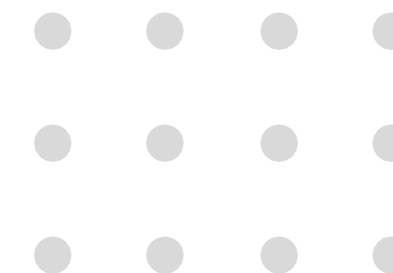


Realisasi



TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TA 2022

REKOMENDASI DPRD	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD (PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN)	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
<p>Guna Lebih Mengoptimalkan Fungsi Inspektorat, Diperlukan Sinergitas Antara Eksekutif Dan DPRD Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah. Dalam Hal Ini Agar Inspektorat Lebih Proaktif Sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan Di OPD Sesuai Dengan Aturan Dan Dapat Meminimalisir Temuan.</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran penyusunan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023 yaitu Rp33,660,000.00,-.</p>	<p>Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di OPD sesuai dengan aturan dan dapat meminimalisir temuan, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Menyusun jadwal pengawasan tahunan yang memuat jadwal, kegiatan dan waktu pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor A57 / Kep.S-Inspt/ 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.</p>



Kebijakan Strategis Tahun 2023

Selama tahun 2023 Inspektorat Daerah telah mengeluarkan kebijakan strategis sebagai bentuk Upaya penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan Indikator Kinerja. Inspektorat Daerah telah memprakarsai 1 peraturan daerah, 1 peraturan gubernur dan 9 Keputusan Gubernur,

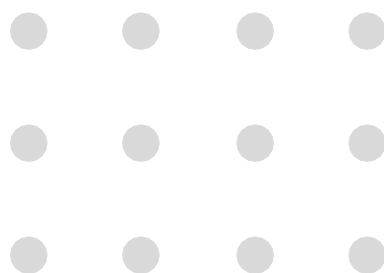
1. Percepatan dalam Penyelesaian kerugian keuangan daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah BPK RI

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur Nomor 188.05/Kep.251-Inspt/2023
tentang Tim Penyusunrancangan Peraturan daerah Provinsi Jawa barat Tentang penyelesaian Tuntutanganti Kerugian Daerah

2. Peningkatan Implementasi SAKIP serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kineeja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Peraturan Gubernur Jawa Barat 19 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Padaperangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



Kebijakan Strategis Tahun 2023

3. Mengoptimalkan Fungsi Inspektorat untuk bersinergi antara Eksekutif Dan DPRD Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur Nomor 057/Kep.5-Inspt/2023

Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

4. Menetapkan Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Keputusan Inspektur Nomor 120.2/Kep.146-Inspt/2023

tentang Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

5. Pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di pemerintah daerah.

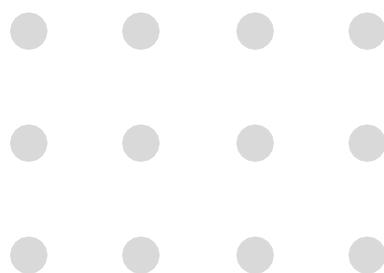
Keputusan Gubernur Nomor 356/Kep.209-Inspt/2023

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Provinsi Jawa Barat

6. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Keputusan Gubernur Nomor 700/Kep.277-Inspt/2023

tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat



Kebijakan Strategis Tahun 2023

7. Mewujudkan disiplin dalam penyerapan anggaran

Keputusan Gubernur Nomor 903.05/Kep.466-Inspt/2023

Tentang Tim Pengawasan Penyerapan Anggaran pendapatan Dan belanja Daerah provinsi Jawa Barat

8. Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat melalui desa.

Keputusan Gubernur Nomor 141.05/Kep.583-Inspt/2023

tentang Tim Replikasi Desa Antikorupsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

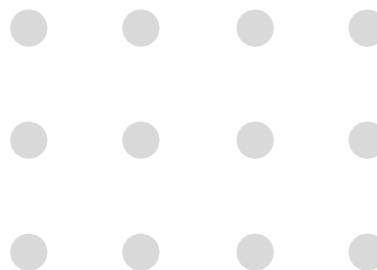
9. Memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah

Keputusan Gubernur Nomor 700.05/Kep.669-Inspt/2023

tentang Tim Efektif Proyek perubahan Strategi Akselerasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Melalui pengawasan Aparat pengawasan Intern pemerintah Berbasis digital

Keputusan Gubernur Nomor 751/Kep.752-Inspt/2023

Tentang Roadmap Strategi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 - 2026





Program Strategis Tahun 2023

Efisiensi Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah

PEMERIKSAAN
BANTUAN KEUANGAN

Rp11.138.173.464,67

PEMERIKSAAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Rp16.484.408.906,67

PENGEMBALIAN KEUANGAN
DARI KASUS HUKUM

Rp985.485.200,00

PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DANA HIBAH

Rp33.583.294.080,00

EVISIENSI HASIL REVIU

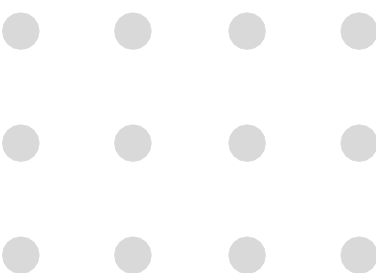
Rp20.874.519.884,55

PENYELAMATAN ASET
PEMROV JABAR

Rp30.862.000.000,00

TOTAL PENYELAMATAN KEUANGAN
DARI EFESIENSI PENGEMBALIAN &
KERUGIAN DAERAH

Rp113.927.881.535,89

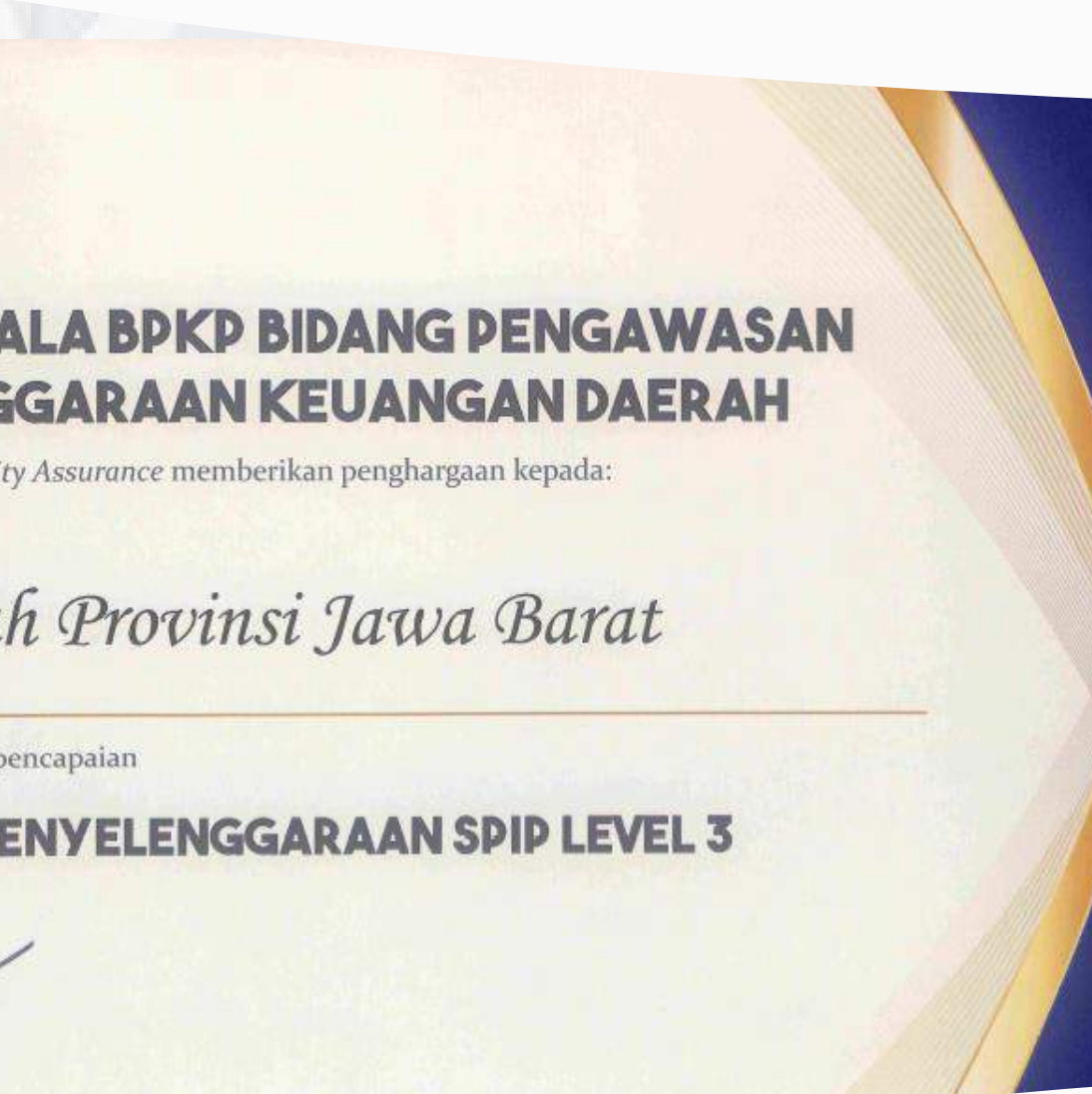


PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan Tahun 2023

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023

Penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi TAHUN 2023

PROVINSI TERBAIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG PENCEGAHAN TAHUN 2023

- 1. Pemerintah Provinsi Bali**
Capaian MCP: 96
Sertifikat BMD: 429 bidang
- 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat**
Capaian MCP: 95,94
Sertifikat BMD: 48 bidang
- 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**
Capaian MCP: 95,75
Sertifikat BMD: 2.355 bidang pada 6 wilayah



Penghargaan sebagai Badan Publik kategori Perangkat Daerah Informatif Tahun 2023

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Juara I Asset Award Jawa Barat Kategori Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Penghargaan sebagai Peserta Terfavorit Kategori Pemerintah Daerah pada Expo Pengawasan Intern Tahun 2023

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Apresiasi Pejabat Pemerintah Daerah yang Berdedikasi Tinggi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

PENGHARGAAN INSPEKTORAT DAERAH 2023



Kontribusi sebagai Wajib Pajak dengan Kontribusi Besar pada Penerimaan Pajak Tahun 2022



TERIMA KASIH
HATUR NUHUN

